

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian global yang semakin pesat saat ini menjadi suatu tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan untuk bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dari pesaing-pesaingnya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan laba. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan tentunya memerlukan dana untuk membiayai semua kebutuhan operasional dan investasinya. Salah satu keputusan penting yang dihadapi manajer keuangan adalah keputusan pendanaan. Perusahaan dapat didanai dengan utang dan ekuitas (Gitman & Zutter, 2012).

Sumber pendanaan merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Jika melihat data terakhir Indonesia, dapat diketahui bahwa Indonesia masih bertumpu pada sektor perbankan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan masyarakat dengan surat utang yang beredar di Indonesia hanya mencapai 7,5 % dari kredit perbankan per 2016. Terdapat beberapa keuntungan yang akan diperoleh dari menerbitkan surat utang di Indonesia jika dibandingkan dengan pendanaan melalui perbankan. Dengan menerbitkan surat utang seperti obligasi dan sukuk, perusahaan dapat menekan biaya bunga karena tidak ada selisih margin bunga sebagai konsekuensi biaya perantara yang biasanya dikenakan oleh Bank. (sumber: www.pefindo.com, Mei 2017)

Penggunaan utang pada perusahaan cenderung meningkatkan nilai sebuah perusahaan. Hal ini terjadi karena utang berakibat timbulnya biaya bunga, dimana komponen biaya bunga menjadi pengurang laba sebelum pajak, sehingga pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Penggunaan utang juga menjadi *leverage* bagi perusahaan karena mendorong jumlah modal saham yang tetap, sedangkan laba meningkat akibat ekspansi bisnis dengan utang. Ketika terjadi gangguan pada pendapatan, arus kas perusahaan akan kesulitan menutup biaya tetap, sehingga timbul risiko likuiditas di jangka pendek. Bila hal ini terjadi dalam waktu lama, akan timbul berbagai masalah yang berujung pada kebangkrutan. Kenaikan utang juga akan mendorong naiknya biaya modal saham akibat risiko yang naik dan biaya pinjaman akibat risiko perusahaan. Perusahaan dengan utang terlalu besar cenderung membuat biaya bunga naik ketika tambahan utang diambil. Hal ini berkonsekuensi buruk bagi nilai perusahaan. Besar bunga juga harus dibandingkan dengan margin yang diperoleh perusahaan. Secara sederhana, bila utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif yang mendorong naiknya pendapatan perusahaan, tentu utang tersebut baik bagi perusahaan. Margin keuntungan yang lebih besar dari biaya bunga menjadi salah satu kunci peningkatan nilai perusahaan. Tetapi bila tambahan utang digunakan untuk membeli aset produktif yang tidak mendorong naiknya pendapatan, tentu ini akan menjadi masalah di masa depan. (Sumber: <https://m.kontan.co.id>, 18 November 2017)

Seperti yang dilakukan oleh PT Panorama Sentrawisata Tbk..Menutup tahun buku 2017, PT Panorama Sentrawisata Tbk. berhasil membukukan penjualan Rp 5,2 triliun, atau meningkat 9 persen dari tahun sebelumnya dan laba kotor

sebesar Rp 501 miliar, naik 14 persen. Panorama juga mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp 36 miliar atau naik sangat signifikan dibandingkan tahun 2016 yang hanya Rp 3 miliar. Hal ini didukung oleh peningkatan kinerja entitas anak dan penurunan beban bunga. (Sumber: Wonderful Indonesia Co-Branding Forum)

Begitu pula dengan perusahaan tambang milik Bakrie. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari merdeka.com, perusahaan tambang milik Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mencatatkan peningkatan kinerja yang signifikan di Semester I-2017. Emiten ini berhasil mencetak laba usai mencatatkan rugi sejak tahun lalu. Perolehan laba ini terutama berasal dari bagian atas laba entitas asosiasi BUMI yang mencapai USD 120,82 juta. Angka ini melonjak 310,33 persen dibandingkan semester pertama tahun lalu USD 15,16 juta. Selain itu, beban bunga dan keuangan BUMI pun mulai turun. Beban bunga dan keuangan BUMI per Juni 2017 mencapai USD 96,27 juta, turun 60,17 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu USD 241,69 juta. (Sumber: <http://m.merdeka.com>)

Sementara kondisi yang berbeda dengan fenomena di atas terjadi pada PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Dilansir dari www.cnbcindonesia.com, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) yang merupakan perusahaan perintis penyelenggaraan jalan tol di Indonesia, memperkirakan laba bersih perusahaan di tahun 2018 akan tergerus jika dibandingkan dengan laba bersih tahun lalu. Tingginya beban bunga perusahaan menjadi faktor turunnya profit perusahaan di tahun ini. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan hingga akhir tahun lalu, jumlah kewajiban perusahaan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2016. Total liabilitas perusahaan berjumlah sebesar Rp 60,83 triliun, naik dari Rp 37,16 triliun di akhir

2016. Adapun jumlah utang berbasis bunga perusahaan jangka pendek bernilai sebesar Rp 1,78 triliun. Sementara, jumlah utang yang akan jatuh tempo di tahun ini mencapai Rp 1,55 triliun. Jumlah utang jangka panjang berbasis bunga juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp 15,12 triliun naik menjadi Rp 29,11 triliun. Sebagian besar utang tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang senilai Rp 4,179 triliun dan Manado-Bitung senilai Rp 3,568 triliun.

Dilansir dari CNN Indonesia, penerbitan surat utang berbasis proyek (*project bond*) oleh anak usaha PT Jasa Marga Tbk (JSMR), yakni PT Marga Lingkar Jakarta mengalami kelebihan permintaan sebesar 1,37 kali atau mencapai Rp 1,8 triliun dari nilai penerbitan yang hanya Rp 1,5 triliun. Kemudian, mayoritas dana yang diraih dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk melunasi kredit investasi. *Project bond* bertajuk Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 ini dibagi atas lima seri yang menawarkan kupon bunga dari 7,45% hingga 8,85%. *Project bond* ini bertujuan agar perusahaan mendapatkan bunga yang tetap selama periode pinjaman dan juga pembayaran pokok atas pinjaman dapat menyesuaikan kemampuan arus kas dari proyek.

Hal serupa terjadi pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk merupakan salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi, tengah menghadapi beban utang yang meningkat. Hal itu membuat manajemen harus memutar otak agar tetap bertahan. *Corporate Secretary*, Tomin Widian mengatakan, selama ini dalam pembukaan cabang seluruh varian toko ritel Alfamart dibiayai dari utang. Sehingga

penambahan cabang seiring dengan penambahan beban bunga utang. Pada laporan keuangan semester I-2017, rasio utang terhadap ekuitas perseroan tercatat naik menjadi 3,58 kali yang disebabkan tambahan pinjaman sebesar Rp 2,6 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding rata-rata industri sebesar 1,82 kali. Perseroan juga memiliki beban bunga sebesar Rp 318 miliar yang menyebabkan penurunan laba bersih. Pada semester I-2017 perseroan mengalami penurunan laba bersih 16,38% dari Rp 90,37 miliar menjadi Rp 75,5 miliar. Tomin mengakui, industri ritel juga saat ini tengah menghadapi kesulitan. Sehingga penambahan cabang yang berasal dari utang belum bisa menyumbang pertumbuhan laba bersih. (<http://www.detik.com>)

Seiring dengan pertumbuhan perusahaan pertambangan di Indonesia, penggunaan utang pun semakin meningkat. Semakin meningkatnya penggunaan utang tersebut, maka jumlah beban bunga yang harus dibayarkan pun meningkat. Hal ini terjadi pada PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) masih mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 10,41 miliar. Padahal, pendapatan perusahaan pada tahun lalu tercatat Rp 11,14 miliar, naik 32,6% dari tahun 2016. Perseroan mengatakan, peningkatan pendapatan belum mendapatkan hasil positif karena faktor beban penyusutan dan beban bunga. Perusahaan menyebut ada dua faktor yang memberatkan yaitu faktor beban penyusutan dan beban bunga. Sementara PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), emiten pertambangan batubara di bawah kelompok usaha Sinarmas, mencatatkan penurunan hingga 53,27% laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sepanjang 2016 menjadi US\$

82,7 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun (kurs Rp 13.500). Penurunan laba bersih dipicu oleh kenaikan beban bunga dan keuangan lainnya perseroan dari US\$ 33,9 juta menjadi US\$46,46 juta. Di sisi lain, Dian Swastatika juga mencatatkan total utang yang naik dari US\$ 880 juta menjadi US\$ 949 juta. Cukup besarnya komposisi dari utang dibandingkan modal menyebabkan perusahaan harus melakukan pembayaran bunga dari utang itu sendiri yang menyebabkan pendapatan berkurang serta adanya resiko perusahaan tidak mampu membayar utang dan relatif sukar untuk meminta tambahan kredit untuk pembiayaan. (www.dunia-energi.com, 1 April 2017)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang memengaruhi biaya utang diantaranya sebagai berikut:

1. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Vhika Meiriasari (2017), Akhmad Samhudi (2016), Yulisa Rebecca (2012).
2. Kepemilikan keluarga yang diteliti oleh Vhika Meiriasari (2017), Yulisa Rebecca (2012), Maydeliana Ayub (2008).
3. Kepemilikan manajerial yang diteliti oleh Ina Ningsih Setiani dan Ani Kusbandiyah (2009), Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa (2009).
4. Kepemilikan institusional yang diteliti oleh Vhika Meiriasari (2017), Silviana Agustami dan Anggun Cahyani Yunanda (2014), Ina Ningsih Setiani dan Ani Kusbandiyah (2009), Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa (2009), Yulisa Rebecca (2012).
5. Ukuran perusahaan yang diteliti oleh Vhika Meiriasari (2017), Mia Ayu Nurdyana dan Yan Rahadian (2016).

6. Pengungkapan sukarela yang diteliti oleh Akhmad Samhudi (2016), Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa (2009), Silviana Agustami dan Anggun Cahyani Yunanda (2014).
7. Kualitas audit yang diteliti oleh Ina Ningsih Setiani dan Ani Kusbandiyah (2009), Mia Ayu Nurdiyana dan Yan Rahadian (2016), Rian Eko Prasetyo dan Surya Raharja (2013), Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa (2009).
8. Komisaris independen yang diteliti oleh Ina Ningsih Setiani dan Ani Kusbandiyah (2009), Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa (2009).
9. Komite audit yang diteliti oleh Rian Eko Prasetyo dan Surya Raharja (2013).

Tabel 1.1

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Biaya Utang Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	<i>Corporate Governance</i>	Kepemilikan Keluarga	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Institusional	Ukuran Perusahaan	Pengungkapan Sukarela	Kualitas Audit	Komisaris Independen	Komite Audit
1	Maydeliana Ayub	2008	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
2	Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa	2009	-	-	×	✓	-	×	✓	×	-
3	Ina Ningsih Setiani dan Ani Kusbandiyah	2009	-	-	×	×	-	✓	×	×	-
4	Yulisa Rebecca	2012	✓	✓	-	×	-	-	-	-	-
5	Rian Eko Prasetyo dan Surya Raharja	2013	-	-	-	-	-	-	✓	-	×
6	Silviana Agustami dan Anggun Cahyani Yunanda	2014	-	-	-	✓	-	×	-	-	-
7	Mia Ayu Nurdiyana dan Yan Rahadian	2016	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
8	Akhmad Samhudi	2016	-	-	×	×	-	✓	✓	×	-
9	Vhika Meiriasari	2017	✓	×	-	✓	✓	-	-	-	-

Sumber: Data diolah

Keterangan: Tanda ✓ = Berpengaruh secara signifikan

Tanda × = Tidak berpengaruh signifikan

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dwi Ricky Nugroho dan Wahyu Meiranto (2014) dengan judul "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2012)", dengan variabel independen kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, frekuensi pertemuan komite audit, kualitas audit, komisaris independen. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012 dengan unit observasi yaitu laporan tahunan dan laporan keuangan dari *website* BEI. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel sebagai berikut : (1) perusahaan di Indonesia yang termasuk dalam golongan perusahaan manufaktur sesuai dengan kategori yang dikembangkan oleh BEI yang tercantum dalam *IDX Fact Book* dan tidak mengalami *delisting* selama tahun 2010-2012; (2) laporan keuangan perusahaan disajikan secara lengkap dan dalam satuan mata uang Rupiah selama tahun 2010-2012; (3) perusahaan yang tidak memiliki nilai ekuitas negatif; (4) perusahaan memiliki saham aktif yang diperdagangkan selama tahun 2010-2012; (6) perusahaan memiliki utang berbunga, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Hasil penelitian oleh Dwi Ricky Nugroho dan Wahyu Meiranto adalah sebagai berikut: kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap biaya utang, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya utang, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya utang, frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya utang, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap biaya utang, komisaris independen berpengaruh positif terhadap biaya utang. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu masih terdapatnya perusahaan manufaktur yang tidak lengkap dalam mengungkapkan *good corporate governance*, terbatasnya lingkup penelitian yaitu hanya perusahaan manufaktur, periode penelitian hanya 3 tahun yaitu 2010-2012, dan unsur-unsur *good corporate governance* di dalam penelitian ini hanya dilihat dari kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, frekuensi pertemuan komite audit, kualitas audit, dan komisaris independen.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen, variabel dependen, sektor perusahaan serta tahun data yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen frekuensi pertemuan komite audit. Namun, pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan variabel frekuensi pertemuan komite audit. Alasan peneliti tidak menggunakan variabel frekuensi pertemuan komite audit dikarenakan adanya hasil pada penelitian sebelumnya yang sudah konsisten. Kemudian, pada penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel dependen yaitu biaya ekuitas dan biaya utang. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel dependen yaitu biaya utang. Alasan peneliti hanya menggunakan variabel biaya utang

disebabkan adanya hasil pada penelitian sebelumnya yang tidak konsisten serta kurangnya penelitian mengenai biaya utang. Penelitian sebelumnya dilakukan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini, penulis meneliti perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti memilih perusahaan pertambangan karena industri ini termasuk salah satu penopang perekonomian Indonesia. Kemudian, pada penelitian sebelumnya menggunakan tahun data 2010-2012 sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun data 2012-2016. Pertimbangan pemilihan tahun data didasari oleh keterbatasan waktu yang digunakan pada penelitian sebelumnya hanya tiga tahun, maka dari itu peneliti ingin menggunakan rentang waktu lebih lama mulai dari tahun 2012 sampai 2016. Kemudian, harga minyak dan batubara merosot dalam lima tahun terakhir, namun sektor tambang masih menjadi penopang ekonomi Indonesia. Serta pada tahun 2016, industri ini termasuk penyumbang terbesar Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam. Kinerja positif ini lalu berimbas pada peningkatan pembayaran utang, kapitalisasi pasar oleh 40 usaha pertambangan teratas dunia juga naik 45% menjadi US\$714 miliar. Pengembalian utang mencapai total US\$93 miliar atau naik dari US\$73 miliar dari tahun sebelumnya. (Sumber: <https://katadata.co.id/24> April 2017)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ricky Nugroho dan Wahyu Meiranto (2014) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Driharsanto dan T. Husain (2017) yang

menyatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

Jika melihat penelitian mengenai biaya utang, maka kita dapat melihat penelitian yang dilakukan oleh Ayub (2008) yang menyatakan bahwa salah satu elemen *Corporate Governance* yaitu kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap biaya utang. Berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Vhika Meiriasari (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Juniarti dan Sentosa (2009) memiliki hasil penelitian sebagai berikut: 1) proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang; 2) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang; 3) kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang; 4) kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Vhika Meiriasari (2017) bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang negatif terhadap biaya utang perusahaan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Setiani dan Kusbandiyah (2009) yang memperoleh hasil sebagai berikut: 1) dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*); 2) kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*); 3) kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*); 4) kualitas audit secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap biaya utang (*cost of debt*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui masih banyak perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan sampel dan metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran setiap variabel. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Biaya Utang (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Berbasis Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Dilihat dari fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka indentifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Masih banyak perusahaan pertambangan berbasis syariah yang mengalami kesulitan keuangan.
2. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh peningkatan beban bunga.
3. Banyak perusahaan yang pada akhirnya terancam bangkrut dikarenakan beban bunga yang tinggi membuat perusahaan kesulitan membayar utangnya.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana kepemilikan keluarga pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
2. Bagaimana kepemilikan manajerial pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
3. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
4. Bagaimana kualitas audit pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
5. Bagaimana komisaris independen pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
6. Bagaimana biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
7. Seberapa besar pengaruh kepemilikan keluarga terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
8. Seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
9. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.

10. Seberapa besar pengaruh kualitas audit terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
11. Seberapa besar pengaruh komisaris independen terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepemilikan keluarga pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui kepemilikan manajerial pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
4. Untuk mengetahui kualitas audit pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
5. Untuk mengetahui komisaris independen pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
6. Untuk mengetahui biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan keluarga terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas audit terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
11. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komisaris independen terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat berupa masukan dan bahan pemikiran yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan mengenai biaya utang di masa mendatang.

1. Kepemilikan keluarga dapat memberikan informasi tentang persentase jumlah saham yang dimiliki keluarga dalam perusahaan.
2. Kepemilikan manajerial dapat memberikan informasi tentang persentase jumlah saham yang dimiliki direksi dalam perusahaan.

3. Kepemilikan institusional dapat memberikan informasi tentang persentase jumlah saham institusional dalam perusahaan.
4. Kualitas audit dapat memberikan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan KAP *non-big four*.
5. Komisaris independen dapat memberikan informasi tentang jumlah dewan komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan direksi serta pemegang saham.
6. Biaya utang dapat memberikan informasi tentang beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditur.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan antara lain:

a. Bagi Penulis

1. Kepemilikan keluarga digunakan penulis untuk mengetahui jumlah saham yang dimiliki keluarga dalam perusahaan.
2. Kepemilikan manajerial digunakan penulis untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham yang tinggi sehingga kinerja perusahaan lebih baik.
3. Kepemilikan institusional digunakan penulis untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah kepemilikan saham institusional sehingga meningkatkan kinerja perusahaan.

4. Kualitas audit digunakan penulis untuk melihat perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan *non-big four*, sehingga dapat mengungkapkan informasi secara benar.
 5. komisaris independen digunakan penulis untuk mengetahui seberapa besar pengawasan terhadap manajemen sehingga kemungkinan kecurangan akan menurun.
 6. Biaya utang digunakan penulis untuk melihat seberapa besar beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan.
- b. Bagi Perusahaan
1. Kepemilikan keluarga digunakan perusahaan sebagai kontrol yang besar atas sebuah perusahaan.
 2. Kepemilikan manajerial digunakan perusahaan untuk menjaga proporsi kepemilikan sehingga dapat menekan terjadinya transaksi utang.
 3. Kepemilikan institusional digunakan perusahaan sebagai tindakan *monitoring* yang dilakukan terhadap pihak manajemen.
 4. Kualitas audit digunakan perusahaan untuk memperoleh hasil audit yang lebih baik.
 5. komisaris independen digunakan perusahaan untuk membantu para pemegang saham mengawasi perilaku manajer.
 6. Biaya utang digunakan perusahaan untuk menilai serta mengendalikan risiko yang terjadi atas penggunaan utang tersebut.

c. Bagi Pihak Lain

1. Kepemilikan keluarga dapat memberikan informasi kepada pihak lain bahwa proporsi kepemilikan saham yang dimiliki keluarga dapat memberikan pengaruh besar di dalam perusahaan.
2. Kepemilikan manajerial dapat memberikan informasi kepada pihak lain bahwa proporsi kepemilikan saham memberikan pengaruh besar terhadap kinerja perusahaan.
3. Kepemilikan institusional dapat digunakan pihak lain untuk melihat seberapa besar tindakan *monitoring* yang dilakukan kepada manajer.
4. Kualitas audit dapat digunakan pihak lain untuk melihat hasil laporan keuangan yang telah diaudit di dalam perusahaan.
5. komisaris independen dapat memberikan informasi bahwa tugasnya memiliki pengaruh besar terhadap kinerja manajer.
6. Biaya utang dapat digunakan pihak lain untuk melihat seberapa besar beban bunga yang dikeluarkan perusahaan setiap tahun.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui *website* www.idx.co.id. Waktu penelitian dimulai pada bulan April 2018 sampai dengan selesai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka ini, ditemukan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian.

2.1.1 *Good Corporate Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Tunggal (2012:24) adalah sebagai berikut:

“*Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, dan masyarakat sekitar”.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai:

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Cadbury Commite of United Kingdom dalam Agoes dan Ardana (2017:101)

mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders* serta mengatur hubungan dan tanggung jawab antara karyawan, kreditur serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan dengan memerhatikan kepentingan para *stakeholders* sesuai dengan aturan dan undang-undang.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Putranto (2013) mengembangkan lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. “Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham asing dan minoritas.
3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan.
4. Keterbukaan dan transparansi.
5. Akuntabilitas dewan komisaris.”

Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (KNKG, 2006) meliputi:

- 1) “Transparansi (*Transparency*)
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*)
- 3) Responsibilitas (*Responsibility*)
- 4) Indepedensi (*Indepedency*)
- 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)”

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang memiliki kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

2. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

3. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

4. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.1.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat *Good Corporate Governance* menurut Wilson Arafat (2008:10)

adalah:

1. “Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.”

Menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) (2009:40), keuntungan yang dapat diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. “Meminimalkan *agency cost*.
2. Meminimalkan *cost of capital*.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan.
4. Mengangkat citra perusahaan.”

Dari kutipan di atas, dapat dijelaskan keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Meminimalkan *Agency Cost*

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *Cost of Capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan Nilai Saham Perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

4. Mengangkat Citra Perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimana masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadang kala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

Meskipun penerapan *Good Corporate Governance* tergolong masih baru, tetapi dalam prakteknya GCG sangat dibutuhkan oleh perusahaan guna mencapai prinsip 3C (*compliant* pada regulasi, *conform* dengan etika bisnis dan *coherent* dengan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis), itulah yang disebut tiga kaki orientasi dari praktik tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (Ria, 2014:27).

2.1.1.4 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum.
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Tujuan dan manfaat dari penerapan GCG menurut Indra dan Ivan (2007)

dalam Agoes dan Ardana (2017:106-107) adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

2.1.1.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut Gideon (2005) dalam Widyasaputri (2012) mekanisme *corporate governance* adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan kegiatan yang ada dalam perusahaan.

2.1.1.5.1 Kepemilikan Keluarga

2.1.1.5.1.1 Pengertian Kepemilikan Keluarga

Pengertian kepemilikan keluarga menurut Faccio dan Lang (2002) dalam Kamaliah *et. al.*, (2013:5) adalah:

“kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham oleh individu maupun perusahaan yang bukan publik.”

Menurut Wirawan dan Diyanti (2014) definisi kepemilikan keluarga adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan keluarga merupakan keseluruhan individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas wajib dicatat), kecuali perusahaan publik, negara, institusi keuangan (lembaga investasi, reksa dana, asuransi, bank, atau dana pensiun) dan publik (yang kepemilikannya tidak wajib dicatat).”

Sedangkan definisi kepemilikan keluarga menurut La Porta *et al.* (1998) dalam Rebecca (2012) adalah:

“Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (di atas 5%), yang bukan perusahaan publik, negara, ataupun institusi keuangan.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan atas sebuah perusahaan yang dimiliki seorang atau sekelompok orang yang bukan perusahaan publik.

2.1.1.5.1.2 Pengukuran Kepemilikan Keluarga

Suatu perusahaan dapat dikatakan dimiliki oleh keluarga (*family owned*) jika keluarga tersebut merupakan *controlling shareholders* atau mempunyai saham setidaknya 20% dari *voting rights* dan merupakan pemilik saham tertinggi dibandingkan dengan *shareholders* lainnya (Chakrabarty (2009) dalam Kamaliah *et. al.*, (2013:5)).

Kepemilikan keluarga (*family ownership*) diukur dengan menggunakan *variable dummy*, yaitu dengan menggunakan skala 1 untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga dalam *annual report*, dan skala 0 untuk perusahaan

yang tidak memiliki kepemilikan keluarga dalam *annual report* yang dapat dilihat pada bagian struktur kepemilikan perusahaan (Harjono (2013) dalam Yudastio (2016)).

Sedangkan menurut Harijono (2013), pengukuran kepemilikan keluarga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KK = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki keluarga}}{\text{Jumlah total saham}} \times 100\%$$

2.1.1.5.2 Kepemilikan Manajerial

2.1.1.5.2.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial

Pengertian kepemilikan manajerial menurut Agnes (2013:4) adalah:

“kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.”

Menurut Pasaribu, Topowijaya, dan Sri (2016:156) pengertian kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.”

Christiawan dan Josua (2007) dalam Tjeleni (2013), menyatakan bahwa:

“Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham.”

Menurut Sonya Majid (2016:4) definisi kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.”

Menurut Dian dan Lidyah (2014:2) menjelaskan bahwa:

“Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan karena apabila pihak manajemen mempunyai bagian dari perusahaan maka manajemen akan maksimal dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan mengurangi kecurangan yang terjadi di dalam manajemen.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan seperti direksi dan dewan komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan.

2.1.1.5.2.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Ikin Solikin, Mimin, Sofie (2013) kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki direksi, komisaris dan manajer}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Akhmad Riduwan dan Enggar Fibria Verdana Sari (2013) pengukuran kepemilikan manajerial sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.1.1.5.3 Kepemilikan Institusional

2.1.1.5.3.1 Pengertian Kepemilikan Institusional

Menurut Mei Yuniati, Kharis, Abrar Oemar (2016) pengertian kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan.”

Pengertian kepemilikan institusional menurut Tarjo (2008) dalam Dian dan Lidyah (2014:2) adalah:

“Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain.”

Adapun pengertian kepemilikan institusional menurut I Wayan, Putu Ayu, dan I Nyoman (2016:177) adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan.”

Menurut Widarjo (2010:25) pengertian kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa pemerintah, institusi swasta maupun asing.”

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Sulistiani (2013)

mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholders* dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%.”

Sedangkan menurut Thesarani (2016) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah serta perusahaan non publik

2.1.1.5.3.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Menurut Mei Yuniati, Kharis, dan Abrar Oemar (2016) kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki instansi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Akhmad Riduwan dan Enggar Fibria Verdana Sari (2013) sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah total saham}} \times 100\%$$

2.1.1.5.4 Kualitas Audit

2.1.1.5.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Definisi kualitas audit menurut De Angelo (1981) dalam Pangestika (2013) adalah sebagai berikut:

“Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditnya.”

Menurut Lee, Liu dan Wang (1999) dalam Erna dan Rahmat (2012) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

“Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.”

Sedangkan pengertian kualitas audit menurut Pangestika (2013) adalah sebagai berikut:

“Kualitas audit adalah audit yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen.”

Auditor yang berkompeten adalah auditor yang memiliki pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai. Sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan salah saji material atau kekeliruan dalam laporan keuangan yang diaudit akan secara independen melaporkan kekeliruan tersebut (Pangestika, 2013).

Halim (2004) dalam Andini (2011) menyimpulkan faktor-faktor penentu kualitas audit terdiri dari:

1. “Pengalaman
2. Pemahaman industri klien
3. Respon atas kebutuhan klien, dan
4. Ketaatan pada standar umum audit.”

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Arens (2013) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar-standar sebagai berikut:

1. “Standar Audit yang Berlaku Umum
2. Standar Pengendalian Mutu”

Adapun penjelasan mengenai standar-standar audit tersebut adalah:

1. Standar Audit yang Berlaku Umum

Standar audit yang berlaku umum yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

2. Standar Pengendalian Mutu

Bagi sebuah KAP, pengendalian mutu terdiri atas metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa auditor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Untuk memenuhi ketentuan yang dimaksud, KAP wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai: a) Independensi, b) Penugasan, c) Konsultasi, d) Supervisi, e) Pengerjaan, f) Pengembangan Profesional, g) Promosi, h) Penerimaan dan keberlanjutan klien, dan i) Inspeksi.

Arens (2012) menjelaskan bahwa di Indonesia, empat KAP terbesar disebut kantor akuntan publik internasional ‘Empat Besar’ atau dikenal sebagai

KAP *big four*. Menurut Wisnu (2011) adapun yang termasuk dalam KAP *big four* adalah:

1. “KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang bekerjasama dengan KAP Drs.Hadi Susanto dan rekan, dan KAP Haryanto Sahari.
2. KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*), yang bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Wijaya.
3. KAP *Ernest and Young*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.
4. KAP *Deloitte Touche Thomatsu*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hans Tuanokata dan Osman Bing Satrio.”

Kualitas audit diukur dalam bentuk variabel *dummy*, dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* yang berafiliasi di Indonesia akan diberi nilai 1 dan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four* akan diberi nilai 0.

Dari definisi-definisi dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit ditentukan dari siapa yang menjadi auditor dari perusahaan tersebut, apabila auditor berasal dari KAP *big four* yang berafiliasi di Indonesia, maka akan menjadi kualitas audit yang lebih akurat dan tepat serta laporan yang disajikan akan berupa apa adanya tanpa manipulasi.

2.1.1.5.4.2 Pengukuran Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1988) dalam Savitri (2010), kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Kualitas audit diukur dengan

mengklasifikasikan atas audit yang dilakukan oleh KAP *The Big Four* yang berafiliasi di Indonesia dengan mendapat nilai 1 dan audit yang dilakukan oleh KAP *Non-Big Four* yang mendapat nilai 0.

2.1.1.5.5 Komisaris Independen

2.1.1.5.5.1 Pengertian Komisaris Independen

Definisi komisaris independen berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik adalah:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Berdasarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* (2006:13) pengertian komisaris independen adalah:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.”

Sementara, pengertian komisaris independen menurut Muhammad Samsul (2015:37) adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali.”

Menurut Anisa dan Kumiasih (2012) dalam Atsil (2015) komisaris independen didefinisikan sebagai:

“seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).”

Definisi komisaris independen menurut Agnes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut:

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.”

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No:KEP-315/BEJ/06-2000 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.

Menurut Surya dan Yustivadana (2006), komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, anggaran tahunan, dan rencana usaha; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen (*accountability*);
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan (*transparancy*) dan adil (*fairness*);
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham (*fairness*).

4. Memonitor pelaksanaan *governance* dan melakukan perubahan jika diperlukan;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan untuk menyediakan tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

2.1.1.5.2 Pengukuran Komisaris Independen

Menurut Djuitaningsih dan Martatilo (2012) pengukuran proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris.”

Menurut Sabila (2012) dalam Atsil Tsabat (2015) proporsi komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Akhmad Riduwan dan Enggar Fibria Verdana Sari (2013) pengukuran komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris yang ada}} \times 100\%$$

2.1.2 Biaya Utang

2.1.2.1 Definisi Utang

Menurut M.Hanafi (2010:29), pengertian utang adalah sebagai berikut:

“Utang didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dan kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Utang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari mana yang dipinjam.”

Menurut Subramaryam dan Wild yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti

(2012:169) pengertian utang atau kewajiban adalah sebagai berikut:

“Kewajiban (utang) merupakan utang untuk mendapatkan pendanaan yang membutuhkan pembayaran di masa depan dalam bentuk uang, jasa, atau aset lainnya. Kewajiban merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan.”

2.1.2.2 Pengelompokkan Utang

Menurut Subramaryam dan Wild yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti

(2012:170) pengelompokkan utang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. “Utang Jangka Pendek (kewajiban lancar)
Utang jangka pendek merupakan kewajiban yang pendanaannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan utang jangka pendek adalah periode masa yang lebih panjang antara satu tahun dan satu siklus operasi perusahaan. Secara konsep, perusahaan harus mencatat seluruh kewajiban pada nilai sekarang seluruh arus kas keluar yang diperlukan untuk melunasinya. Pada praktiknya, kewajiban lancar dicatat pada nilai jatuh temponya, bukan pada nilai sekarangnya, karena pendeknya waktu penyelesaian utang.
2. Utang Jangka Panjang (kewajiban tak lancar)
Utang jangka panjang (kewajiban tak lancar) merupakan kewajiban yang jatuh temponya tidak dalam satu tahun atau satu siklus operasi, aman yang lebih panjang. Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar.”

Menurut Fahmi (2013:163) pengelompokkan utang dibagi menjadi dua yaitu:

1. "Utang Jangka Pendek (*Short-Term Liabilities*)
Short term liabilities sering disebut juga dengan utang lancar (*current liabilities*). Penegasan utang lancar karena sumber utang jangka pendek digunakan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Dan utang jangka pendek ini umumnya harus dikembalikan kurang dari satu tahun.
2. Utang Jangka Panjang (*Long-Term Liabilities*)
Long-term liabilities sering disebut dengan utang tidak lancar (*non current liabilities*). Penyebutan utang tidak lancar karena dana yang digunakan dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat *tangible asset* (aset yang bisa disentuh), dan memiliki nilai jual yang tinggi jika suatu saat dijual kembali. Karena itu penggunaan dana utang jangka panjang ini digunakan untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pembangunan pabrik, pembelian tanah dan gedung, dan sebagainya."

2.1.2.3 Definisi Biaya Utang

Definisi biaya utang menurut Fabozzi (2007) dalam Juniarti dan Sentosa (2009:91) yaitu:

"Biaya utang (*cost of debt*) sebagai tingkat pengembalian (bunga) yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan."

Adapun menurut Singgih (2008) dalam Juniarti dan Sentosa (2009:91) mengemukakan pengertian dari *cost of debt* adalah:

"*cost of debt* adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjamannya."

Sedangkan menurut PSAK No. 26 (Revisi 2011), biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman dapat meliputi:

- 1) Beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif seperti dijelaskan dalam PSAK 55 (revisi 2011) instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran.
- 2) Beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011) sewa.
- 3) Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Menurut Rebecca (2012) utang digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan karena memberikan keuntungan berupa *tax saving* yang disebabkan bunga pinjaman bersifat *tax deductible* sehingga pada akhirnya mengutangi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa biaya utang adalah pinjaman yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan, pinjaman ini menghasilkan bunga pinjaman yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Perusahaan harus tumbuh dan berkembang, sehingga mampu memenuhi kewajiban antara lain untuk membayar kepada kreditur, baik bunga maupun pokoknya. Namun, bila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit atau bangkrut (Boedi *et. al.*, 2008 dalam Septian dan Panggabean, 2014:2). Hal ini merupakan konsekuensi atas penggunaan dana dari pihak ketiga (perbankan, lembaga keuangan lain, atau pihak lainnya) sehingga secara tidak langsung manajemen telah melibatkan kreditur sebagai *controlling system* untuk mendorong perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dan ikut mengawasi kinerja perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya utang merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh kreditur atas sejumlah dana yang dipinjamkan kepada perusahaan, sebagai usaha kreditur untuk meminimalkan risiko timbulnya kerugian atas pinjaman tersebut.

2.1.2.4 Pengukuran Biaya Utang

Pittman dan Fortin (2004) dalam Indah dan Dwi (2012) mengukur variabel *cost of debt* dari besarnya beban bunga perusahaan dalam satu periode dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang menghasilkan bunga pinjaman selama tahun tersebut.

Menurut Nugroho dan Meiranto (2014) biaya utang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$COD = \frac{\text{interest expense}}{\text{Average long term debt}}$$

Sedangkan Katarina (2012) menjelaskan bahwa biaya utang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$COD = \frac{\text{interest expense}}{\text{Average interest bearing debt}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dan proses penelitian dimana kerangka pemikiran harus menerangkan, pemikiran intinya berusaha menjelaskan konstelasi hubungan antar variabel yang akan diteliti.

Konstelasi hubungan tersebut idealnya dikuatkan oleh teori atau penelitian sebelumnya (Desy Kurnia Sari, 2016).

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Biaya Utang

Harahap dan Wardhani (2012) dalam Kusumawati dan Juniarti (2014:173) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi memiliki tingkat konflik keagenan lebih rendah dengan perusahaan yang kepemilikan keluarganya rendah. Kepemilikan saham dalam jumlah besar berarti bahwa tingkat pengendalian yang dimiliki terhadap perusahaan pun besar. Penggunaan pengendalian ini meningkatkan insentif pemegang saham untuk meningkatkan keuntungan pribadi dan sebagai akibatnya, kreditur mengantisipasi risiko tersebut dengan biaya utang yang lebih tinggi.

Boubakri dan Ghouma (2010) dalam Rebecca (2012) memberikan bukti bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya utang yang diukur dengan *bond yield-spreads*. Pada umumnya, perusahaan dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi dapat ditemukan pada perusahaan milik keluarga, yaitu perusahaan yang dimiliki secara mayoritas oleh keluarga tertentu atau kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada keluarga tertentu. Boubakri dan Ghouma (2010) menyatakan bahwa ketika kepemilikan keluarga adalah pemegang saham mayoritas perusahaan, mereka cenderung menggunakan kontrol yang dimiliki untuk merugikan pihak kreditur (*debtholders*). Penelitian ini sejalan dengan Ayub (2008) yang menyatakan bahwa salah satu elemen *Corporate*

Governance yaitu kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap biaya utang.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vhika Meiriasari (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak kreditur cenderung untuk tidak memerhatikan proporsi kepemilikan keluarga dalam menentukan biaya utang yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dengan kata lain, besar kecilnya proporsi kepemilikan keluarga tidak menggambarkan suatu risiko tertentu. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan kepemilikan keluarga dapat mengurangi *agency problem* antara manajer dengan pemegang saham. Ketika perusahaan dikelola oleh CEO yang masih memiliki hubungan keluarga dengan keluarga pemilik perusahaan, konflik antara pemegang saham, manajer, dan kreditur dapat diminimalkan.

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Biaya Utang

Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. Kinerja perusahaan yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan (Ikin Solikin, Mimin, Sofie, 2013).

Berdasarkan penelitian oleh Friend dan Lang dalam Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa manajer yang bertindak sebagai pemegang saham tentu akan bertindak lebih hati-hati terutama dalam hal pengambilan keputusan kebijakan utang untuk menghindari terjadinya kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha.

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*) maka akan terjalin hubungan yang lebih baik antara manajer dan pemegang saham. Karena kedua belah pihak ini memiliki tujuan yang sama sehingga akan sangat kecil kemungkinan timbulnya *agency conflict*. Dengan hal ini, maka para manajer akan menekan terjadinya transaksi utang untuk tetap menjaga proporsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Dengan menekan jumlah utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka akan membuat para kreditur melihat kinerja perusahaan tersebut lebih baik.

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham (Thesarani, 2016).

Sedangkan menurut Shuto dan Kitagawa (2010), besarnya biaya keagenan utang dan peringkat obligasi perusahaan juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepemilikan manajerial dan *cost of debt*. Besarnya biaya keagenan utang muncul sebagai akibat adanya peningkatan kepemilikan manajerial di perusahaan dan perusahaan yang memiliki peringkat obligasi yang rendah mencerminkan adanya biaya keagenan utang yang besar dan risiko gagal bayar yang tinggi. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan *cost of debt*.

Shuto dan Kitagawa (2010:41) dalam Rebecca (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*). Sehingga pada akhirnya pihak kreditur mengompensasikan hal tersebut dengan membebankan biaya utang yang lebih tinggi kepada perusahaan. Sedangkan pemegang saham yang tidak terdiversifikasi atau hanya terkonsentrasi pada pihak tertentu saja memiliki orientasi untuk investasi jangka panjang sehingga lebih memperhitungkan risiko dan investasi yang dilakukannya.

2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Utang

Jika dilihat dengan menggunakan teori agensi (*agency theory*) maka dengan adanya pengawasan yang ketat dari pihak investor institusional, akan meningkatkan kinerja manajemen untuk menunjukkan kinerja sebuah perusahaan yang lebih baik dan dapat mencegah terjadinya kecurangan yang akan dilakukan oleh manajer. Serta dengan adanya pengawasan yang ketat, dapat membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Hasil penelitian Roberts dan Yuan (2009) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya pinjaman bank karena dengan kepemilikan institusional yang besar memberikan insentif untuk melakukan pengawasan atau *monitoring* yang lebih ketat terhadap pihak manajemen sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk

mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Dian dan Lidyah, 2014:2).

Menurut Nuraina (2012:112) mengemukakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka akan semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi *agency cost*, sehingga perusahaan akan menggunakan dividen yang rendah. Dengan adanya kontrol yang ketat, menyebabkan manajer menggunakan utang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* dan risiko kebangkrutan.

Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah besar sehingga proses *monitoring* terhadap manajer menjadi lebih baik (Wiranata dan Nugrahawati, 2013:18).

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustami dan Yunanda (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Penelitian ini mendukung teori agensi yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan dikarenakan kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi jalannya suatu

perusahaan. Dengan demikian perusahaan dianggap berisiko rendah dan biaya bunga yang diperoleh pun akan semakin rendah pula.

Hasil penelitian ini yang dilakukan Agustami dan Yunanda (2014) juga mendukung hasil penelitian Juniarti dan Sentosa (2009) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Menurut Juniarti dan Sentosa (2009) hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang berarti sebagai tindakan *monitoring* yang dilakukan kepada pihak manajemen. Dengan adanya tindakan *monitoring* yang dilakukan kepada manajemen dapat menjaga kinerja perusahaan tetap baik, sehingga kreditur memandang risiko perusahaan rendah. Sementara hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Setiani dan Kusbandiyah (2009) yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*).

2.2.4 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Biaya Utang

Khurana dan Raman (2004) dalam Susanto dan Siregar (2012) mengungkapkan bahwa kualitas audit menggunakan ukuran KAP *big four* mampu memberikan jaminan yang lebih tinggi atas keandalan laporan keuangan sehingga perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* memiliki biaya utang yang lebih rendah dibandingkan dengan yang diaudit oleh KAP *non-big four*.

Ashbaugh et al. (2004) dalam Nugroho dan Meiranto (2012) menemukan bahwa perusahaan dengan kualitas audit yang baik dapat menunjukkan hasil laporan keuangan yang sebenar-benarnya. Kualitas audit dalam cakupan prinsip

corporate governance mewakili transparansi dan resposibilitas, dimana pada hasil laporan keuangan yang diaudit secara independen mengungkapkan informasi tentang kinerja perusahaan secara benar.

De Angelo (1981) dalam Pangestika (2013) menunjukkan bahwa KAP yang besar cenderung menyediakan layanan audit ke klien dengan kualitas yang lebih tinggi daripada KAP kecil. Hal itu terjadi karena KAP besar mempunyai reputasi yang lebih baik sehingga harus memerhatikan kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*). Menurut Juniarti dan Sentosa (2009) semakin besar kualitas audit, maka *cost of debt* perusahaan akan semakin kecil. Jadi perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* akan memperoleh hasil audit yang lebih baik dan memuaskan, karena KAP *big four* tersebut juga berusaha untuk menjaga reputasinya di mata masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan Yunita (2012) serta Nurdiyana dan Rahadian (2013) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

2.2.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Biaya Utang

Dewan komisaris independen memiliki peranan yang penting bagi sebuah perusahaan, yaitu memonitor peran dan kerja manajemen di dalam sebuah perusahaan. Baysinger dan Butler (1985) dalam Yesika (2013) bahwa perusahaan yang memiliki dewan independen yang besar, memiliki kinerja yang unggul.

Dengan adanya kinerja yang baik maka akan mengurangi asimetri yang terjadi antara pemegang saham dan manajer, karena dewan komisaris akan ikut andil dalam menjalankan kebijakan di sebuah perusahaan.

Komisaris independen memiliki tingkat indepedensi yang cukup tinggi. Hal ini diyakini oleh lembaga, akademisi, dan pembuat kebijakan bahwa kemandirian dari dewan komisaris independen yang bebas dari pengaruh manajemen perusahaan akan efektif dalam memantau manajemen perusahaan (Singh *et al.*, 2015).

Dewan komisaris independen yang lebih banyak dalam dewan komisaris secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen (Chtourou *et al.*, 2001; dalam Juniarti dan Sentosa, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Meiranto (2014) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan dewan komisaris dapat mencegah terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham dengan dilakukannya *monitoring* yang rutin oleh dewan komisaris independen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Sentosa (2009) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang terdapat pada gambar 2.1, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

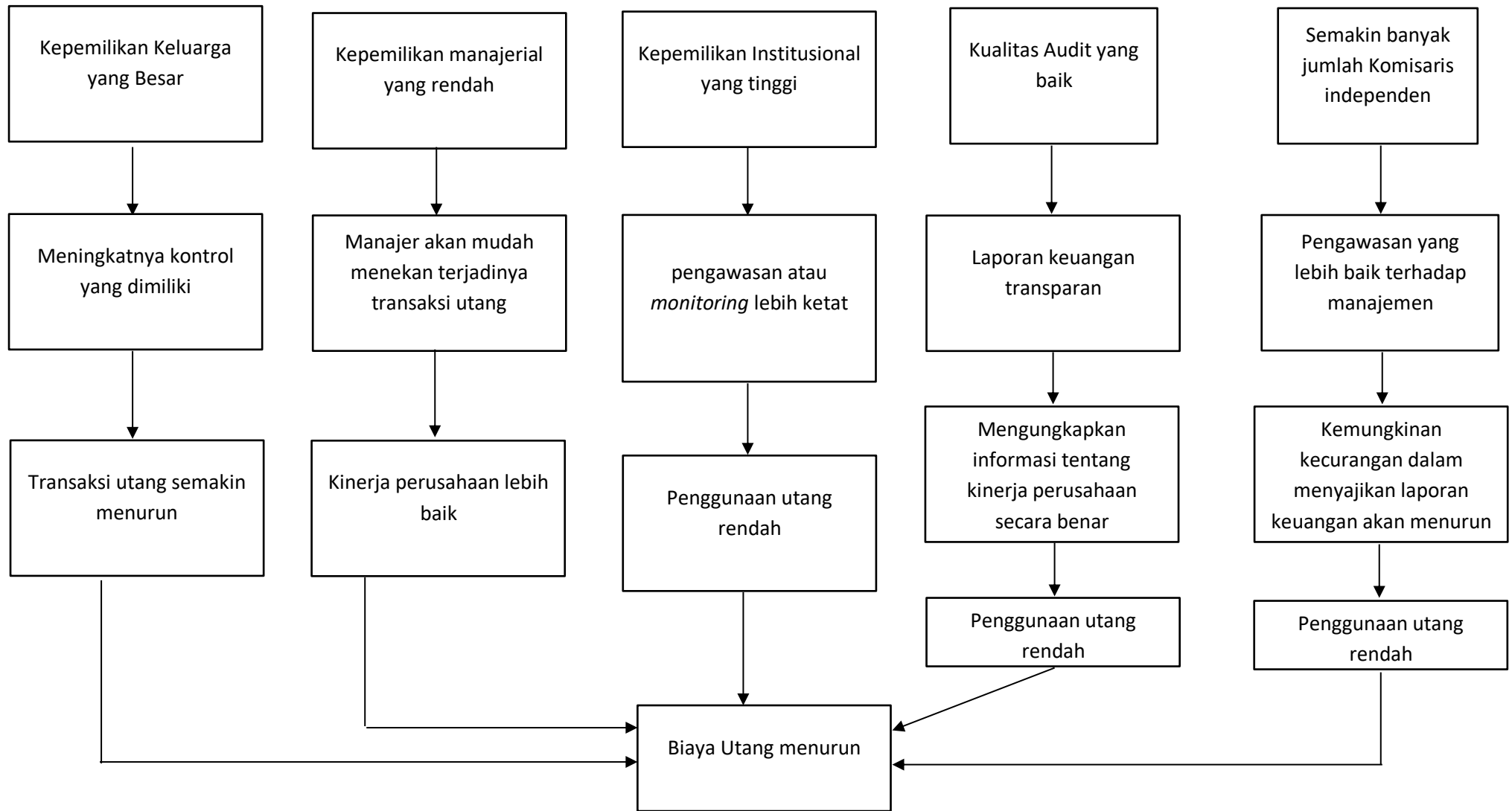
H1 : Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap biaya utang

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap biaya utang

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya utang

H4 : Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap biaya utang

H5 : Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap biaya utang



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini. Dimana penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan juga menginterpretasikan pengaruh antara variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, *factual*, dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antara variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2015:147) pengertian metode deskriptif adalah sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen, dan biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

Menurut Sugiyono (2016:14) pengertian metode penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

“Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti, yang dianalisis dan dikaji. Menurut Sugiyono (2015:38) mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut:

“Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Objek penelitian yang digunakan adalah kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen, dan biaya utang pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

3.3 Unit Analisis dan Unit Observasi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Unit observasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan yang meliputi laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang diperoleh dari www.idx.co.id.

Data yang diperoleh dari laporan arus kas meliputi beban bunga, sedangkan data yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan meliputi modal saham, utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang berbunga.

3.4 Definisi Variabel dan Pengukurannya

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2015:59) adalah: “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.”

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2013: 39) pengertian variabel independen adalah: “....variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme *good corporate governance*. Adapun penjelasannya sebagai berikut::

a. Kepemilikan Keluarga (X_1)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang dikemukakan oleh Faccio dan Lang (2002) dalam Kamaliah et. Al., (2013:5): “Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham oleh individu maupun perusahaan yang bukan publik.”

Adapun indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur variabel kepemilikan keluarga adalah indikator yang dikemukakan oleh Harijono (2013) bahwa pengukuran kepemilikan keluarga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KK = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki keluarga}}{\text{Jumlah total saham}} \times 100\%$$

b. Kepemilikan Manajerial (X_2)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan definisi kepemilikan manajerial yang dikemukakan oleh Sonya Majid (2016:4):

“Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator yang dikemukakan oleh (Ikin Solikin, Mimin, Sofie, 2013):

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki direksi, komisaris dan manajer}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

c. Kepemilikan Institusional (X_3)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan definisi kepemilikan institusional yang dikemukakan oleh I Wayan, Putu Ayu, dan I Nyoman (2016:177):

“Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Mei Yuniati, Kharis, dan Abrar Oemar (2016):

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki instansi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

d. Kualitas Audit (X_5)

Peneliti menggunakan definisi kualitas audit menurut Pangestika (2013):

“Kualitas audit adalah audit yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator yang dikemukakan oleh De Angelo (1988) dalam Savitri (2010) bahwa kualitas audit diukur dengan menggunakan *variable dummy*. Dan dapat diukur dengan mengklasifikasikan atas audit yang dilakukan oleh KAP *The Big Four* yang berafiliasi di Indonesia mendapat nilai 1 dan audit yang dilakukan oleh KAP *Non-Big Four* yang mendapat nilai 0.

e. Komisaris Independen (X_6)

Peneliti mengambil konsep berdasarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* (2006:13):

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Sabila (2012) dalam Atsil Tsabat (2015):

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

2. Variabel Dependen

Variabel dependen Menurut Sugiyono (2015:59) adalah:

“variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.”

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu Biaya Utang (Y). Definisi biaya utang menurut Fabozzi (2007) dalam Juniarti dan Sentosa (2009:91) yaitu:

“Biaya utang (*cost of debt*) sebagai tingkat pengembalian (bunga) yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Katarina (2012):

$$COD = \frac{\text{interest expense}}{\text{Average interest bearing debt}}$$

3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, konsep indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian.

Dalam pengujian, masing-masing variabel independen dan variabel dependen diuraikan ke dalam indikator-indikator variabel yang bersangkutan, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Kepemilikan Keluarga	<p>kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham oleh individu maupun perusahaan yang bukan publik</p> <p>Faccio dan Lang (2002) dalam Kamaliah et. Al., (2013:5)</p>	$KK = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki keluarga}}{\sum \text{total saham}} \times 100\%$ <p>Harijono (2013)</p>	Rasio
Kepemilikan Manajerial	<p>Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.</p> <p>Sonya Majid (2016:4)</p>	$KM = \frac{\sum \text{Saham Manajerial}}{\sum \text{Saham beredar}} \times 100\%$ <p>Ikin Solikin, Mimin, Sofie (2013)</p>	Rasio
Kepemilikan Institusional	<p>Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana</p>	$KI = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki institusional}}{\sum \text{Saham beredar}} \times 100\%$	Rasio

	<p>pensiun) yang terdapat pada perusahaan.</p> <p>I Wayan, Putu Ayu, dan I Nyoman (2016:177)</p>	<p>Mei Yuniati, Kharis, dan Abrar Oemar (2016)</p>	
Kualitas Audit	<p>Kualitas audit adalah audit yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen.</p> <p>Pangestika (2013)</p>	<p>“<i>Big Four</i>” yang berafiliasi di Indonesia = 1 ; Non “<i>Big Four</i>” = 0</p> <p>De Angelo (1988) dalam Savitri (2010)</p>	Nominal
Komisaris Independen	<p>Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.</p>	$KI = \frac{\sum \text{dewan komisaris independen}}{\sum \text{dewan komisaris}} \times 100\%$ <p>Sabila (2012)</p>	Rasio

	pedoman umum <i>Good Corporate Governance</i> (2006:13)	dalam Atsil Tsabat (2015)	
Biaya Utang	<p>Biaya utang (<i>cost of debt</i>) sebagai tingkat pengembalian (bunga) yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan.</p> <p>Fabozzi (2007) dalam Juniarti dan Sentosa (2009:91)</p>	$COD = \frac{\text{interest expense}}{\text{Average interest bearing debt}}$ <p>Katarina (2012)</p>	Rasio

3.6 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:80) definisi populasi adalah sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan definisi di atas, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016, dengan jumlah 24 perusahaan.

Tabel 3.2**Daftar Perusahaan Pertambangan Berbasis Syariah**

No	Kode	Nama Perusahaan
Sub Sektor Pertambangan Batubara		
1	ADRO	PT. Adaro Energy, Tbk.
2	ARII	PT. Atlas Resources Tbk.
3	ATPK	PT. Bara Jaya International Tbk.
4	BSSR	PT. Baramulti Suksesserana Tbk.
5	DEWA	PT. Darma Henwa Tbk.
6	GEMS	PT. Golden Energy Mines Tbk.
7	GTBO	PT. Garda Tujuh Buana Tbk.
8	HRUM	PT. Harum Energy Tbk.
9	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk.
10	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk.
11	MBAP	PT. Mitrabara Adiperdana Tbk.
12	MYOH	PT. Amindo Resources Tbk.
13	PTBA	PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
14	PTRO	PT. Petrosea Tbk.
15	TOBA	PT. Toba Bara Sejahtera Tbk.
Sub Sektor Pertambangan Minyak		
16	ARTI	PT. Ratu Prabu Energi Tbk.
17	ELSA	PT. Elnusa Tbk.

Sub Sektor Pertambangan Logam dan Mineral Lainnya		
18	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
19	CITA	PT Cita Mineral Investindo Tbk.
20	INCO	PT Vale Indonesia Tbk.
21	PSAB	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.
22	TINS	PT Timah (Persero) Tbk.
Sub Sektor Pertambangan Batu-Batuan		
23	CTTH	PT Citatah Tbk.
24	MITI	PT Mitra Investindo Tbk

3.7 Sampel dan Teknik Sampling

3.7.1 Sampel

Menurut Sugiyono (2015:116) definisi sampel sebagai berikut:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili).”

Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Selain itu juga diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus menunjukkan segala karakteristik populasi sehingga tercermin dalam sampel yang dipilih. Dengan kata lain, sampel harus dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

Sampel dipilih dari perusahaan pertambangan berbasis syariah berdasarkan penjelasan pada pembahasan mengenai objek penelitian. Pemilihan sampel pada perusahaan pertambangan berbasis syariah dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan periode penelitian dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang representatif dengan jumlah 6 (enam) perusahaan.

Tabel 3.3

**Daftar Perusahaan Pertambangan Berbasis Syariah yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016
yang Menjadi Sampel Penelitian**

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADRO	PT. Adaro Energy, Tbk.
2	PSAB	PT J Resources Asia Pasifik Tbk.
3	CTTH	PT Citatah Tbk.
4	TINS	PT Timah (Persero) Tbk.
5	PTBA	PT. Bukit Asam, Tbk.
6	ELSA	PT. Elnusa, Tbk.

Sumber: Bursa Efek Indonesia

3.7.2 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2015:116) definisi teknik sampling adalah sebagai berikut:

“teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.”

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*, dan lebih tepatnya adalah metode *purposive sampling*. Pemilihan sampel secara *purposive sampling* dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis.

Adapun kriteria-kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan tersebut tidak *delisting* (penghapusan saham yang terdaftar oleh Bursa Efek Indonesia) selama periode 2012-2016.
2. Perusahaan pertambangan berbasis syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap tahun 2012-2016.
3. Perusahaan pertambangan berbasis syariah yang melaporkan data yang mencerminkan mekanisme *good corporate governance* terhadap biaya utang.

Tabel 3.4

Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
	Perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016	24
Tidak Memenuhi Kriteria:		

1.	Perusahaan yang <i>delisting</i> (penghapusan saham yang terdaftar oleh Bursa Efek Indonesia) selama periode 2012-2016.	(2)
2.	Perusahaan pertambangan berbasis syariah yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap tahun 2012-2016.	(8)
3.	Perusahaan pertambangan berbasis syariah yang tidak melaporkan data yang mencerminkan mekanisme <i>good corporate governance</i> terhadap biaya utang.	(8)
Jumlah Sampel Penelitian		6

3.8 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.8.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang dapat menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tertentu yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Menurut Sugiyono (2008: 402), data sekunder adalah: "...data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance* pada suatu perusahaan.

3.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224), teknik pengumpulan data adalah: “...langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi yaitu dengan cara pengumpulan data-data berupa dokumen serta catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Selain metode dokumentasi, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research yaitu online research*) dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber-sumber pustaka yang mendukung penelitian.

3.9 Analisis Data

3.9.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015:147) analisis deskriptif adalah:

“Menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen, dan biaya utang dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Struktur Kepemilikan Keluarga

Menurut Harijono (2013) untuk mengetahui kepemilikan keluarga, langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain:

- a. Menentukan jumlah saham yang dimiliki oleh keluarga pada perusahaan pertambangan berbasis syariah.
- b. Menentukan total saham yang beredar dari setiap perusahaan.
- c. Menentukan persentase kepemilikan keluarga dengan membagi jumlah yang dimiliki oleh keluarga dengan total saham yang beredar dalam perusahaan.
- d. Menentukan rata-rata (*mean*) kepemilikan keluarga dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dibagi dengan jumlah tahun.
- e. Membuat kriteria kesimpulan yaitu dengan cara menentukan nilai tertinggi dibagi 5 untuk memperoleh interval.
- f. Membandingkan rata-rata (*mean*) dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- g. Menetapkan kriteria kesimpulan.

Tabel 3.5

Kriteria Kesimpulan Kepemilikan Keluarga (X₁)

Interval	Kriteria
0% - 20,00%	Sangat Rendah
20,01% - 40,00%	Rendah
40,01% - 60,00%	Sedang
60,01% - 80,00%	Tinggi
80,01% - 100%	Sangat Tinggi

Sumber : Harijono (2013)

2. Struktur Kepemilikan Manajerial

- a. Menentukan jumlah saham yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris pada perusahaan pertambangan berbasis syariah.
- b. Menentukan total saham yang beredar dari setiap perusahaan.
- c. Menentukan persentase kepemilikan manajerial dengan membagi jumlah yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris dengan total saham yang beredar dalam perusahaan.
- d. Menentukan rata-rata (*mean*) kepemilikan manajerial dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dibagi dengan jumlah tahun.
- e. Membuat kriteria kesimpulan yaitu dengan cara menentukan nilai tertinggi dibagi 5 untuk memperoleh interval.
- f. Membandingkan rata-rata (*mean*) dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- g. Menetapkan kriteria kesimpulan.

Tabel 3.6

Kriteria Kesimpulan Kepemilikan Saham Manajerial (x_2)

Interval	Kriteria
0,00% - 17,00%	Sangat Rendah
17,01% - 34,00%	Rendah
34,01% - 51,00%	Sedang
51,01% - 68,00%	Tinggi
68,01% - 85,00%	Sangat Tinggi

Sumber: Komite Nasional Kebijakan Governance (2006)

3. Struktur Kepemilikan Institusional

- a. Menentukan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi pada perusahaan pertambangan berbasis syariah

- b. Menentukan jumlah saham yang beredar dari setiap perusahaan
- c. Menentukan persentase kepemilikan institusional dengan membagi jumlah saham yang dimiliki instansi dengan jumlah saham yang beredar dalam perusahaan.
- d. Menentukan rata-rata (*mean*) kepemilikan institusional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dibagi dengan jumlah tahun.
- e. Membuat kriteria kesimpulan yaitu dengan cara menentukan nilai tertinggi dibagi 5 untuk memperoleh interval.
- f. Membandingkan rata-rata (*mean*) dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- g. Menetapkan kriteria kesimpulan.

Tabel 3.7

Kriteria Kesimpulan Kepemilikan Institusional (X₃)

Interval	Kriteria
0% - 20,00%	Sangat Rendah
20,01% - 40,00%	Rendah
40,01% - 60,00%	Sedang
60,01% - 80,00%	Tinggi
80,01% - 100%	Sangat Tinggi

Sumber : Data yang diolah kembali

3. Struktur Kualitas Audit

Wisnu (2011) mengklasifikasikan Kantor Akuntan Publik berdasarkan KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four*. Kategori KAP *The Big Four* diantaranya:

1. “KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang bekerjasama dengan KAP Drs.Hadi Susanto dan rekan, dan KAP Haryanto Sahari.
2. KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*), yang bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Wijaya.
3. KAP *Ernest and Young*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.
4. KAP *Deloitte Touche Thomatsu*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hans Tuanokata dan Osman Bing Satrio.”

Tabel 3.8

Kriteria Kesimpulan Kualitas Audit (X₅)

Interval	Kriteria
1	Audit dilakukan oleh KAP <i>The Big Four</i> yang berafiliasi di Indonesia
0	Audit tidak dilakukan oleh KAP <i>The Big Four</i> yang berafiliasi di Indonesia

Sumber : De Angelo (1988) dalam Savitri (2010)

Klasifikasi	Kriteria
Audit dilakukan oleh KAP <i>The Big Four</i> yang berafiliasi di Indonesia	Baik
Audit tidak dilakukan oleh KAP <i>The Big Four</i> yang berafiliasi di Indonesia	Kurang Baik

5. Struktur Komisaris Independen
 - a. Menentukan jumlah dewan komisaris independen yang ada pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI.
 - b. Membagi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris

- c. Membuat jarak (jarak interval kelas) dengan cara menghitung selisih nilai maksimum dan minimum kemudian dibagi menjadi lima kriteria.
- d. Membuat tabel frekuensi nilai perubahan untuk komisaris independen.
- e. Menetapkan kriteria kesimpulan.

Berdasarkan Modifikasi dari Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, perusahaan yang memadai memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Tabel 3.9

Kriteria Kesimpulan Struktur Komisaris Independen (X₆)

Interval	Kriteria
< 20%	Sangat Tidak Memadai
20% - 30%	Tidak Memadai
31% - 40%	Cukup Memadai
41% - 50%	Memadai
> 50%	Sangat Memadai

Sumber : Modifikasi dari Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang

Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham

6. Struktur Biaya Utang

- a) Menentukan persentase biaya utang dengan membagi beban bunga dengan utang berbunga.
- b) Menentukan rata-rata (*mean*) biaya utang dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dibagi dengan jumlah tahun.
- c) Menetapkan kriteria kesimpulan

Dilansir dari detik.com, suku bunga kredit perbankan nasional masih berada di kisaran 11,73%. Pemerintah mengharapkan suku bunga kredit ini bisa di bawah 10% untuk mendorong perekonomian.

Tabel 3.10

Kriteria Kesimpulan Struktur Biaya Utang (Y_1)

Interval	Kriteria
< 5,00%	Sangat Tinggi
5,01% - 10,00%	Tinggi
10,01% - 15,00%	Cukup Tinggi
15,01% - 20,00%	Rendah
< 20,00%	Sangat Rendah

Sumber : Data yang diolah kembali

3.9.2 Analisis Asosiatif

Analisis asosiatif digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini analisis asosiatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap biaya utang.

Menurut Sugiyono (2014: 36), pengertian penelitian asosiatif adalah: “...penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang akan dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.”

3.9.2.1 Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu sebelum dibuat analisis korelasi dan regresi, hal tersebut untuk menguji apakah model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* (ε) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 23.0 for windows*.

Menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, maka terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu variabel independen dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 2012:234).

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Gujarati, 2012:432). Menurut Singgih Santoso (2012:236) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{Tolerance} \text{ atau } Tolerance = \frac{1}{VIF}$$

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Menurut Gujarati (2012:406) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji *rank-Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual hasil regresi. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulan terdapat heteroskedastisitas varian dari *residual* tidak homogen).

Untuk menguji heteroskedastisitas salah satunya dengan melihat penyebaran dari varians pada grafik *scatterplot* pada output SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji *rank-Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dan residual hasil regresi, jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka

kesimpulannya terdapat heterokedastisitas (*varians* dari residual tidak homogeny), (Ghozali, 2011: 139).

d. Uji Autokorelasi

Menurut Singgih Santoso (2012:241), uji autokorelasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Model yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Menurut Sunyoto (2016:98), salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dapat digunakan besaran Durbin Watson (DW). Berikut adalah tabel Uji Durbin-Watson dalam Winarno (2015: 531), dapat dilihat dalam tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11

Uji Statistik Durbin-Watson

Nilai Statistik d	Hasil
$0 < d < DL$	Ada autokorelasi positif
$dL < d < du$	Ragu-ragu
$Du < d < 4-du$	Tidak ada korelasi positif/negatif
$4-du < d < 4-dL$	Ragu-ragu
$4-dL < d < 4$	Ada korelasi negatif

3.9.2.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis ini, penulis menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

Hipotesis nol (H_0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun rancangan pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

Perumusan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a)

- $H_{01} : (\beta_1 = 0)$, Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang
- $H_{a1} : (\beta_1 \neq 0)$, Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap biaya utang
- $H_{02} : (\beta_2 = 0)$, Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang
- $H_{a2} : (\beta_2 \neq 0)$, Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap biaya utang
- $H_{03} : (\beta_3 = 0)$, Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang

- $H_{a3} : (\beta_3 \neq 0)$, Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya utang
- $H_{o4} : (\beta_4 = 0)$, Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang
- $H_{a4} : (\beta_4 \neq 0)$, Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap biaya utang
- $H_{o5} : (\beta_5 = 0)$, Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang
- $H_{a5} : (\beta_5 \neq 0)$, Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap biaya utang

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 diterima apabila : $H_0 : \beta_j = 0$

H_0 ditolak apabila : $H_1 : \beta_j \neq 0$

Apabila H_0 diterima, maka hal diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan dan sebaliknya apabila H_0 ditolak, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.

3.9.2.2.1 Uji Parsial (*t-test*)

Pengujian yang dilakukan adalah uji parameter (uji korelasi) dengan menggunakan uji t-statistik. Hal ini membuktikan apakah terdapat pengaruh antara

masing-masing variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). menurut Sugiyono (2014:250) rumus yang digunakan adalah:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

T = Nilai Uji t

r = Koefisien korelasi pearson

r² = Koefisien determinasi

n = Jumlah sampel

Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 uji dua pihak dan dk= n-2, kriteria sebagai berikut:

4. H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > t_{tabel}$
5. H_0 ditolak bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > t_{tabel}$

Jika hasil pengujian statistik menunjukkan H_0 ditolak, maka variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Akan tetapi, apabila H_0 diterima, maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.9.2.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2016: 261). Analisis regresi digunakan untuk menguji sifat hubungan sebab-akibat antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

(Sugiyono, 2016: 261)

Keterangan:

Y = Subjek dalam variabel dependen (biaya utang)

a = Harga Y ketika harga X – 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X = Variabel independen

3.9.2.4 Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel yang dalam hal ini variabel lainnya dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel *control*). Variabel yang diteliti adalah data rasio maka teknik statistik yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment*.

Koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Nilai koefisien harus terdapat dalam batas-batas -1 hingga $+1$ ($-1 < r \leq +1$), yang menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai variabel independen akan diikuti oleh kenaikan dan penurunan variabel dependen.
- b. Tanda negatif menunjukkan adanya korelasi negatif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan nilai-nilai variabel independen akan diikuti oleh penurunan nilai variabel dependen dan sebaliknya.
- c. Jika $r = 0$ atau mendekati 0 , maka menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada korelasi sama sekali antara variabel-variabel yang diteliti.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut:

Tabel 3.12

Kategori Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Kriteria
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Cukup kuat
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2013:214)

3.9.2.5 Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial. Koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2012:257):

$$KD = r^2 \times 100\%$$

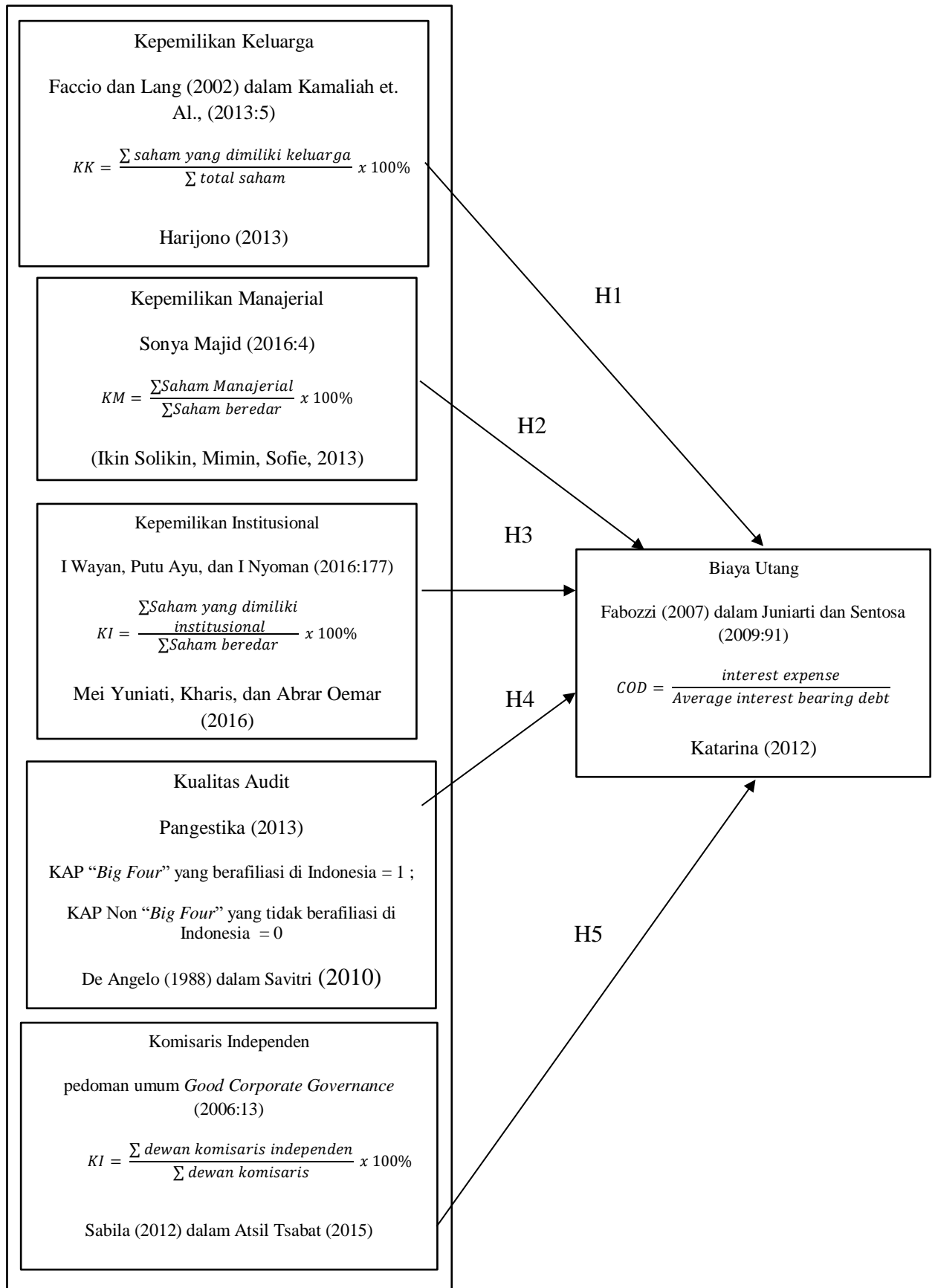
Keterangan:

KD = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

3.10 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi fenomena yang diteliti. Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komisaris independen terhadap biaya utang (*cost of debt*), maka hubungan antar variabel dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1

Model Penelitian

